

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau yang masuk di dalam wilayah negara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966 dijelaskan bahwa terdapat kurang lebih sejumlah 17.508 pulau masuk dalam wilayah Indonesia. United Nation Group of Expert on Geographical Names (UNEGN) telah memverifikasi sejumlah 2.590 pada tahun 2017 pulau pada konferensi 11th United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) yang berlangsung di New York. Dengan tambahan tersebut maka sebanyak 16.056 pulau telah teregistrasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari sejumlah pulau tersebut, terdapat lima pulau dengan predikat terbesar besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa angka penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa dan sebanyak 56,10% atau 151,59 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa (BPS, 2020). Di sisi lain, luas Pulau Jawa hanya berkisar 7% dari total keseluruhan luas wilayah Indonesia. Pulau dengan jumlah penduduk terbesar selanjutnya adalah Pulau Sumatera sebesar 21,68% dan Pulau Sulawesi sebesar 7,36%.

Raffles (2010) berpendapat bahwa nama Jawa ini salah satunya berakar dari kata *jaù* bermakna jauh atau *Yava* yang bermakna jelai. Etnis paling mendominasi di Pulau Jawa sendiri yaitu Jawa dan Sunda. Budaya-budaya yang ada di Pulau Jawa sendiri memiliki pengaruh yang berasal dari masa kerajaan Hindu-Budha, kesultanan Islam, hingga kolonial Hindia-Belanda di masa lampau.

Secara administratif, terdapat enam provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi Banten menjadi provinsi paling barat dan Jawa Timur merupakan provinsi paling timur di Pulau Jawa.

Salah satu hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat yaitu Provinsi Banten. Wilayah ini resmi menjadi provinsi sejak tahun 2000 sesuai dengan keputusan Undang-undang no. 23 Tahun 2000. Total luas wilayah Provinsi Banten sebesar 9.352,77 km² dan terdapat sebanyak 12,2 juta penduduk pada tahun 2022 (BPS Provinsi Banten, 2022). Kini, Provinsi Banten tersusun atas empat kabupaten dan empat kota.

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi salah satu provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Banten. DKI Jakarta merupakan sebuah provinsi dan juga ibukota negara. Penetapan DKI Jakarta sebagai ibukota dan daerah otonom sesuai dengan pasal 3 Undang-undang no. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 10.562.088 jiwa (BPS, 2020). Komposisi penduduk tersebut didominasi oleh Laki-laki sebanyak 5.334.781 orang dan perempuan 5.227.307 orang.

DKI Jakarta memiliki lima kota administratif, diantaranya, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Selain itu, terdapat sebuah kabupaten administratif, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang berlokasi di barat Pulau Jawa dengan beribukotakan Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat secara sah menjadi provinsi di Indonesia berdasarkan Undang-undang no. 11 Tahun 1950. Pada periode waktu 1950 kala itu Provinsi Djawa Barat terdiri Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon. Saat ini, dengan luas wilayah sebesar 37.044,86 km² Provinsi Jawa Barat tersusun atas 27 wilayah kota dan kabupaten.

Jawa Barat menjadi provinsi yang berpopulasi tinggi pada tahun 2020. Sensus penduduk menunjukkan, Jawa Barat memiliki sebanyak 48.274.162 jiwa penduduk. Di sisi lain, pada tahun 2022, provinsi ini memiliki sebanyak 25.578.174 angkatan

kerja (BPS, 2023c). Data tersebut menunjukkan bahwa provinsi ini menjadi wilayah dengan populasi terbesar diantara seluruh provinsi lain di Indonesia.

Berbatasan secara langsung dengan Provinsi Jawa Barat, di bagian tengah Pulau Jawa terdapat Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang dinobatkan menjadi ibukota dari provinsi ini. Luas Jawa Tengah sebesar 28,94% dari keseluruhan luas Pulau Jawa. Tidak hanya daratan, Jawa Tengah juga memiliki Pulau Nusakambangan di sebelah selatan dan Pulau Karimunjawa di Laut Jawa.

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah mulanya dari Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta. Seiring berjalannya waktu, Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah 29 kabupaten dan 6 buah kota.

Sensus penduduk tahun 2020 menyatakan bahwa Jawa Tengah dihuni oleh sebanyak 36.516.035 orang. Bahkan, pada tahun 2022 luas panen tanaman pangan mencapai 1.699.436 ha (BPS, 2023c). Pertanian menjadi sektor utama perekonomian provinsi ini. Kondisi ini didukung oleh keberadaan gunung vulkanik yang berada di Jawa Tengah. Gunung tersebut terdiri dari Gunung Merapi, Slamet, Sumbing, dan Parahu. Kondisi ini membuat kondisi tanah di Jawa Tengah memungkinkan untuk mengembangkan sektor pertanian.

Di selatan Jawa Tengah terdapat sebuah provinsi yang memiliki predikat Daerah Istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY. DIY memiliki perbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Selaku salah satu daerah istimewa, DIY memiliki keunikan dibandingkan provinsi lain. Sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf c, seorang Gubernur DIY merupakan individu yang memiliki tahta Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat oleh individu bertahta Adipati Paku Alam. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari satu kota dan empat kabupaten.

Per tahun 2020, Provinsi DIY menyandang predikat selaku provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di Pulau Jawa. Terdapat sebanyak 3.668.719 orang penduduk di provinsi ini. Terdiri dari yang berjenis kelamin pria sejumlah 1.817.927 dan sebagian lain berjenis kelamin wanita sebesar 1.850.792. Pada tahun 2022 sendiri, DIY memiliki jumlah angkatan kerja sebanyak 2.336.076 orang.

Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Jatim merupakan provinsi yang menempati bagian timur Pulau Jawa. Kota Surabaya menjadi ibukota untuk Provinsi Jatim. Dasar hukum pembentukan Provinsi Jatim yaitu Undang-undang no. 12 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jatim ini terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten. Dengan luas sebesar 48.036,84 km², provinsi ini menjadi yang terluas diantara keenam provinsi di Pulau Jawa. Wilayah Provinsi Jatim berbatasan langsung secara dengan Selat Bali, Samudera Hindia, Laut Jawa, dan berbatasan darat dengan Provinsi Jawa Tengah.

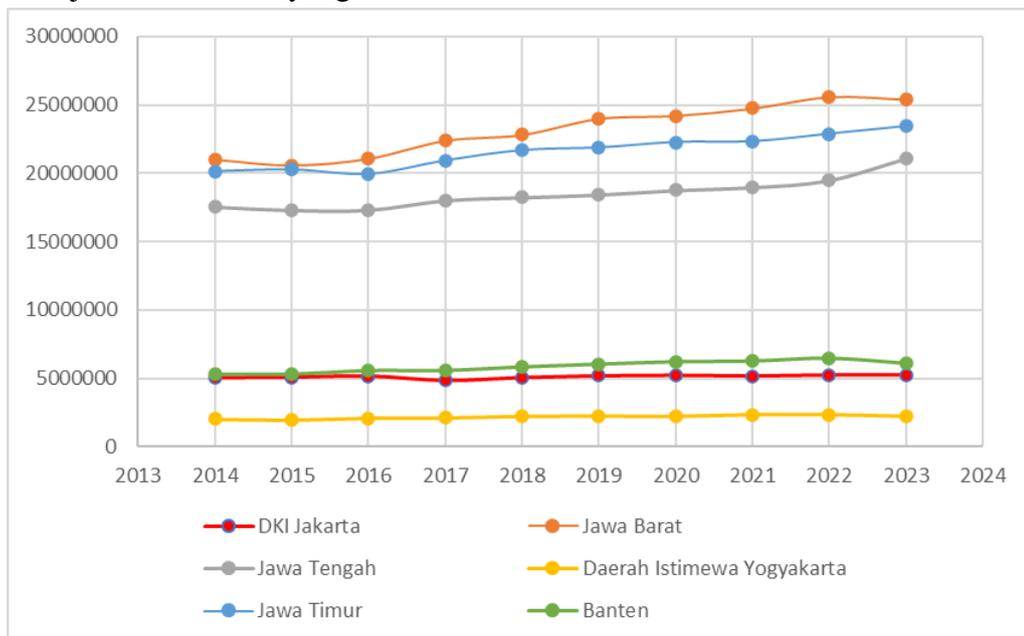
Sesuai sensus penduduk 2020, Provinsi Jatim dihuni oleh sebanyak 40.665.696 orang. Komposisi penduduk perempuan lebih unggul dibanding laki-laki sebanyak 20.374.104 orang. Di sisi lain, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.817.927 orang. Pada 2022 sendiri, Provinsi Jatim memiliki angkatan kerja sebanyak 22.869.012 orang. Jika dilihat dari PDB atas dasar harga berlaku, pada tahun 2022 provinsi ini memiliki PDB sebesar Rp2.730.907 miliar dan berkontribusi sebesar 14,26% terhadap PDB nasional (BPS, 2023c).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia berpredikat sebagai negara dengan berpopulasi terbesar keempat di muka bumi dengan peringkat PDB terbesar ke-16 serta Indonesia menempati urutan ke 25 berdasarkan ekspor (World Bank, 2022). Jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa mengacu pada hasil sensus penduduk tahun 2020 (BPS, 2020). Indonesia memiliki modal besar dari aspek sumber daya manusia yang mendapat manfaat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Kondisi ini diperkuat dengan proyeksi bahwa Indonesia akan mengalami *demographic dividend* atau bonus demografi. Bonus demografi sendiri memiliki makna berubahnya struktur usia populasi di wilayah sebuah negara seiring adanya pergantian angka natalitas serta mortalitas tinggi ke rendah hingga berdampak pada kondisi akselerasi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Gribble & Bremner, 2012). Hayes & Setyonaluri (2015) memproyeksikan Indonesia mengalami puncak bonus demografi sekitar tahun 2025 dengan kondisi rasio 45 orang di luar usia kerja per 100 orang usia kerja. Dengan kata lain, satu orang usia kerja menanggung 2,2 orang di luar usia kerja. International Monetary Fund (2018) memproyeksikan angkatan kerja Indonesia akan meningkat dalam beberapa dekade selanjutnya, bahkan diproyeksikan akan menjadi sebanyak 70% dari populasi pada tahun 2031.

Grafik pada Gambar 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja selama periode 2014-2023 pada sebagian besar provinsi dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan jumlah terbesar. Ketiga provinsi tersebut terjadi peningkatan tren populasi angkatan kerja pada periode 2014-2023. Sementara itu, DKI Jakarta, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan fluktuasi yang lebih bervariasi.



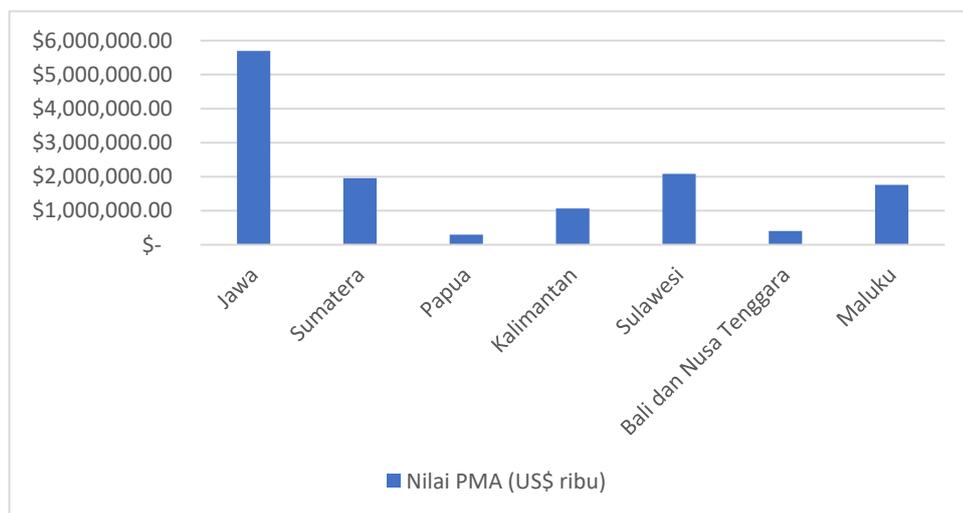
Gambar 1. 1 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Jawa

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional, 2024

Momen ini merupakan kondisi yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah karena bonus demografi tidak terjadi setiap saat. Di saat melimpahnya penduduk usia kerja, berarti akan banyak orang yang mencari pekerjaan. Bonus demografi akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi seumpama dimanfaatkan dengan baik. Pengaruh tersebut disebabkan oleh penduduk sebagai pasar bagi barang dan jasa serta penduduk sebagai faktor produksi (Purwati & Prasetyanto, 2022).

Namun, bila tenaga kerja tersebut tidak terserap, maka secara otomatis angka pengangguran akan meningkat, sehingga dapat berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan sosial ekonomi. Dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah tersebut, maka sektor ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pembuat keputusan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.

Sebaran penduduk Indonesia saat ini terpusat di Pulau Jawa. Hingga 2020, sebanyak 56,10% dari keseluruhan penduduk Indonesia atau 151,59 juta jiwa tersebar di Pulau Jawa. Banyaknya penduduk yang mendiami Pulau Jawa, menjadikan pulau tersebut sebagai pusat perekonomian Indonesia. Hal tersebut



Gambar 1. 2 Realisasi PMA Berdasarkan Lokasi Triwulan Ketiga Tahun 2023

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, diolah 2023

tercermin dari struktur perekonomian Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2023 yang disumbang oleh provinsi-provinsi yang terletak di zona Pulau Jawa dengan andil kepada PDB Indonesia sebesar 57,12% (BPS, 2023b).

PMA menjadi salah satu variabel pendorong pertumbuhan perekonomian bagi sebuah negara, terlebih negara berkembang (Saidi et al., 2023). Pada tahun 2022, aliran PMA ke negara berkembang meningkat sebesar 4% menjadi US\$916 miliar dan menjadi rekor tertinggi (UNCTAD, 2023). Kementerian Investasi/BKPM sendiri mencatat secara *year to date* hingga triwulan kedua tahun 2023, PMA menyerap tenaga kerja hingga 312.090 orang.

Pertumbuhan PMA dapat meningkatkan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat menurunkan angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja, terlebih terlihat dalam jangka panjang (Widia et al., 2019). Secara langsung atau tidak langsung, PMA dapat membuka lapangan kerja. Lapangan kerja baru tersebut pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran (Indrajaya & Driyastutik, 2024).

Instrumen ekonomi makro lain, seperti ekspor dapat memainkan peran dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia (Yolanda, 2017a). Perusahaan yang memiliki akses terhadap pasar luar negeri akan melakukan ekspansi pasar yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja yang baru (Feenstra et al., 2019). Kinerja ekspor Indonesia sendiri mencapai angka US\$22,15 miliar pada Oktober 2023. Angka ini mengalami penurunan 10,43% dibandingkan dengan Oktober di tahun sebelumnya. Jika dilihat dari awal tahun 2023, nilai ekspor Indonesia hingga Oktober 2023 mencapai US\$214,41 miliar. Kinerja ekspor ini mengimbangi tekanan pada impor, sehingga berimplikasi pada kondisi surplus neraca perdagangan selama 42 bulan berturut-turut hingga Oktober 2023.

Barang-barang komoditas sumber daya alam masih menjadi salah satu penyumbang nilai ekspor. Kondisi ini menyebabkan kerentanan terhadap ketidakstabilan harga komoditas internasional. Penciptaan lapangan kerja yang didorong oleh kenaikan harga komoditas kemungkinan hanya bersifat sementara (World Bank, 2022).

Di sisi lain, faktor inflasi beserta pengangguran menjadi isu ekonomi penting di banyak negara. Inflasi dapat memberikan dampak pada aktivitas perekonomian di suatu negara, seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan sebagainya (Behera & Mishra, 2017; Komariyah et al., 2020; Yolanda, 2017b).

Inflasi dapat dikatakan sebagai peningkatan pada tingkat harga barang dan jasa di suatu negara dikombinasikan dengan penurunan nilai uang secara konsisten dalam jangka waktu tertentu (Shiyalini & Bhavan, 2021). Faktor inflasi ini dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap variabel-variabel ekonomi lainnya.

Sesuai dengan hukum permintaan, ketika terjadi kenaikan harga maka berdampak pada menurunnya tingkat permintaan. Sebaliknya, seumpama terdapat penurunan harga maka berdampak terhadap peningkatan permintaan barang (Komariyah et al., 2020). Dalam kondisi permintaan yang sedang naik menyebabkan perusahaan menaikkan harga dan di saat yang sama perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak pekerja untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak (Mankiw, 2018). Hal ini senada dengan penelitian Wulandari et al. (2019) yang mengatakan naiknya tingkat inflasi pada suatu daerah akan menurunkan tingkat pengangguran karena perusahaan perlu menambah tenaga kerja.

Namun, di kala kondisi inflasi yang naik secara terus-menerus dan tak terkendali, maka akan berdampak pada biaya operasional perusahaan meningkat yang disebabkan oleh naiknya biaya-biaya produksi (Roziq et al., 2024). Kondisi ini yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun dan berdampak pula pada perusahaan lainnya (Ferranti & Yunita, 2015).

Beberapa penelitian telah mengungkap bagaimana hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Sasongko & Huruta (2019) mengungkapkan bahwa di Indonesia, inflasi tidak berpengaruh pada pengangguran. Soekapdjo & Oktavia (2021) dan Karimah et al. (2023) mengungkap inflasi memiliki hubungan negatif signifikan terhadap terhadap pengangguran.

Berdasarkan penjelasan dan uraian mengenai fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta memfokuskan penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh PMA, Ekspor, dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia (Studi Kasus pada Provinsi di Pulau Jawa)”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Hayes & Setyonaluri (2015) dan International Monetary Fund (2018), Indonesia akan mengalami bonus demografi. Namun, hingga pada tahun 2020 sebanyak 56,10% atau 151,59 juta jiwa

terkonsentrasi di Pulau Jawa (BPS, 2020). Proyeksi International Monetary Fund (2018) bahkan menyatakan proporsi populasi angkatan kerja sebesar 70% dari keseluruhan populasi. Tentunya, jumlah tenaga kerja akan melimpah pada kondisi ini. Diperlukan sinkronisasi kebijakan dalam skala makro dengan sektor ketenagakerjaan untuk menyerap limpahan tenaga kerja.

Sebelumnya, penelitian Komariyah et al. (2020) mengemukakan bahwasanya PMA serta kinerja ekspor memberikan dampak positif signifikan. Akan tetapi, inflasi memberikan dampak negatif signifikan. Dengan kondisi Indonesia yang akan didominasi oleh angkatan kerja, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pernyataan tersebut dikarenakan faktor penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Penelitian ini memiliki intensi dalam menggali faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, studi kasus pada provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan perumusan masalah, terdapat beberapa pertanyaan yang dirumuskan untuk memecahkan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PMA berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023?
2. Apakah ekspor berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023?
3. Apakah inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023?
4. Apakah PMA, ekspor, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PMA secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekspor secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PMA, ekspor, dan inflasi secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2023

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diekspektasikan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai kalangan, mulai dari peneliti hingga pembuat kebijakan. Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2014-2023. Selain itu diharapkan luaran penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.5.2 Aspek Praktis

Diharapkan luaran penelitian ini mampu menyediakan informasi bagi pihak perusahaan terkait ragam penyebab yang dapat berefek pada penyerapan tenaga kerja serta keputusan perekrutan tenaga kerja. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan tinjauan bagi pemerintah pusat dan daerah mengenai ragam faktor yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau otoritas terkait.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada subbab sistematika penulisan berisikan mengenai gambaran setiap bab dalam penelitian ini. Rancangan sistematika penulisan pada penelitian ini memuat lima buah bab yang saling berkaitan satu dan lainnya. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini diantaranya:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memuat beragam teori yang berkaitan dengan objek serta variabel pada penelitian ini. Teori tersebut dilengkapi dengan referensi dan penelitian terdahulu yang relevan. Lalu disertai pula dengan subbab kerangka pemikiran yang dilengkapi dengan visual berupa gambar serta subbab hipotesis penelitian yang memuat empat buah hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 dari penelitian ini merinci pendekatan dan metode yang digunakan, meliputi berbagai aspek seperti tipe penelitian, definisi operasional variabel, langkah-langkah penelitian, populasi dan sampel yang dianalisis, serta metode dan sumber pengumpulan data. Selain itu, dijelaskan pula teknik analisis data yang terdiri dari beberapa subbab penting yaitu statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi data panel, pengujian hipotesis, koefisien determinasi, serta uji F dan uji t. Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini juga dijabarkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian yang dilakukan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memaparkan penjabaran serta interpretasi hasil temuan dari penelitian selaras dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian secara sistematis.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir menyuguhkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian pada bab ini dilengkapi dengan saran bagi penelitian yang akan datang.